

“Lubang-Lubang Bisnis Batubara Bagi Penerimaan Negara”

A. Latar Belakang

Data yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun lalu terkait industri pertambangan cukup mencengangkan. Di sektor ini, ribuan perusahaan berukuran kecil hingga menengah ditengarai belum membayar pajak, termasuk para pemegang konsesi batu bara, untuk beberapa tahun lamanya.

Pada 2014, KPK mencatat 1.850 perusahaan tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Perusahaan tersebut tersebar di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Yang janggal, walau tidak membayar pajak, perusahaan-perusahaan tersebut tetap melakukan penambangan dan transaksi perdagangan terutama ekspor.

Masalah di industri tambang tak berhenti pada pajak. Sekitar 70 persen dari 11 ribu perusahaan juga tidak membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP), royalti, dan iuran tetap yang lain. Terkait lingkungan, hampir 90 persen pengusaha tambang tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan rencana pascatambang.

Sejak tiga tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengidentifikasi akan praktik lancung sejumlah perusahaan bau bara yang mencoba menghindari pajak atau *tax avoidance* dan penggelapan pajak alias *tax evasion*.

Bila dihitung dengan mengkalkulasikan beberapa tahun terakhir, nilai pajak yang tertunggak dari perusahaan-perusahaan itu mencapai triliunan rupiah. Sejah ini, besarnya pajak yang tak terbayar dari sektor tersebut berkelindan dengan tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan yang masih sangat buruk.

Faktanya, memang banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan namun tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Salah satu faktornya lantaran izin usaha pertambangan untuk areal sekian hektare diterbitkan oleh pemerintah daerah.



Begitu pula ketika batu bara tersebut ditransaksikan, banyak data yang tidak cocok di antara sejumlah instansi. Akibatnya, penentuan pembayaran royalti, pajak badan, dan PNBK kerap tidak terpantau dengan baik.

Untuk mengurai problematika di seputar usaha pertambangan batubara tersebut dan dampaknya bagi penerimaan negara, Katadata Forum dan Perkumpulan Prakarsa mengadakan acara diskusi dengan tema “Lubang-Lubang Bisnis Batubara Penerimaan Negara”.

Melalui acara ini juga diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengelolaan usaha pertambangan batubara.

B. Tempat & Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
Pukul : 13.00 - 15.00 WIB
Tempat : Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Gambir, Jakarta Pusat

C. Pembicara

- Moderator: **Yulawati** (Managing Editor Katadata)
- Bapak **Johnson Pakpahan** (Direktur Penerimaan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM))
Bahasan:
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi usaha pertambangan batubara sehingga mendatangkan penerimaan negara yang optimal
- Bapak **Dedi Hartono** (Spesialis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))
Bahasan:
Usaha pencegahan dan penindakan yang dilakukan jika terjadi praktik ‘gelap’ hingga penggelapan pajak.



- Bapak **Firdaus Ilyas** (Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW))

Bahasan:

Peran dari organisasi di luar pemerintah dalam hal mengawasi berjalannya sektor penambangan batubara.

- Bapak **AH Maftuchan** (Direktur Perkumpulan Prakarsa)

Bahasan:

Kondisi dan perkembangan pengelolaan usaha batubara di dalam negeri.

D. Peserta

Acara akan dihadiri oleh sekitar 50 peserta, dari kalangan media, pemerintahan, NGO dan umum, dll.

E. Penyelenggara

Katadata adalah perusahaan media, data dan riset online di bidang ekonomi dan bisnis. Didirikan pada 1 April 2012 di Jakarta, perusahaan ini menyajikan berita, informasi, data, dan hasil riset secara mendalam bagi kepentingan para pemimpin bisnis dan pengambil kebijakan, namun dikemas secara lugas dan atraktif agar mudah dipahami publik. Tim Katadata terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman di bidang energi, finansial, makroekonomi, perdagangan dan infrastruktur. Produk Katadata dapat diakses di katadata.co.id (situs berita) dan databoks.co.id (portal data).

